

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1996. *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta. Djamban.
- Aisyah Muda Cemerlang, Et. Al, 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Lampung. Pusaka Media.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- A.Widiada Gunakaya, 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. Andi.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Edi Saputra Hasibuan, 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*. Depok. Rajawali Pers.
- Gunawan Markus dan Endang Astuty, 2009. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Jakarta Selatan. Visimedia.
- Johny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media Publishing.
- Julie Mertus, 2001. *HAM Kaum Perempuan: Langkah Demi Langkah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Mardjono Reksodiputro, 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- M. Sofyan Lubis, 2010. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Jakarta. Pustaka Yustitia.
- Muladi, 2002. *HAM dan Reformasi Hukum Indonesia*. Jakarta. The Habibie Center Cet.I.
- Peter R. Baehr, 1998. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Rahayu, 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Rhoda E. Howard, 2000. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- R. Soesilo, 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor. Politeia.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2003. *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa Awal Perkembangannya*. Surabaya. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation.
- Titon Slamet Kurnia, 2005. *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Abadi.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

JURNAL

- Agus Raharjo dan Angkasa, 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23. No. 1.
- Asror Nawawi, 2017. "Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11. No. 1, hlm. 1868.
- Gatot Triyanto, 2018. "Persamaan Hak bagi Tersangka atau Terdakwa untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)". *Jurnal Rechtsens*. Vol. 7. No. 2.
- Heri Qomarudin dan Novindah Kurniadi, 2022. "Tindak Pidana Perdagangan Wanita untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial pada Media Sosial". *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol. 3. No. 2.
- Imelda Irina Evangelista, 2018. "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran HAM Berat menurut KUHP". *Jurnal LexCrimen*, Vol. 7. No. 3.
- Jose dan Rahaditya, 2022. "Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 5. No. 1.

- Jufri, 2015. "Pengawasan Penyidik Polri sebagai Bentuk Perlindungan HAM dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 3. No. 2.
- Komang Dara Trimarlina, Et. Al, 2019. "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan". *Jurnal Anologi Hukum*. Vol. 1. No. 3.
- Mutia Hafina Putri, et. al, 2023. "Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vo. 14. No. 7.
- Phileo Hazelya Motulo, Et. Al., 2020. "Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 1. No. 4.
- Risma Sri Nurani, 2022. "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Iman dan Spritualisme*. Vol. 2. No. 3.
- Sitompul, 2003. "Tugas Polisi dalam Upaya Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum*. Vol. 10. No. 23.
- Sri Hastuti Puspitasari, 2002. "Komnas HAM Indonesia, Kedudukan dan Peranannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. 9. No. 21.
- Sri Wulandari, 2013. "Hukum tentang Konsepsi Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Jurnal Ilmiah*. Vol. 2. No. 2.
- Sudrajat, S. A., 2022. "Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan". *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. Vol. 1. No. 1.
- Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni dan Iswandi, 2024. "Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan HAM berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993". *Jurnal Constitutional Law*. Vol. 4. No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komnas HAM

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

TESIS

Dwi Yuliyanto, 2023. "Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan". *Tesis Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi*. Semarang.

MAKALAH

MM Billah, 2003. "Tipologi dan Praktek Pelanggaran HAM di Indonesia". Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.

INTERNET

Amnesty International Indonesia, 2024. "*Penyiksaan oleh Aparat Penegak Hukum Kian Mengkhawatirkan*". <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>. dikunjungi pada tanggal 7 Maret 2025 Jam 12.55.

Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Erwina Rachmi Puspawati, 2024. "*Data Komnas HAM-KontraS, Polisi Paling Banyak Dilaporkan Lakukan Penyiksaan*".

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/28/070000065/data-komnas-ham-kontras-polisi-paling-banyak-dilaporkan-lakukan-penyiksaan>.
dikunjungi pada tanggal 14 Maret 2025 Jam 19.49.

Ayu, 2015. “*Investigasi Dokumentasi Untuk Semua Pihak Yang Membutuhkan Kebenaran*”. diakses melalui <https://bantuanhukum.or.id/investigasi-dan-dokumentasi-untuk-semua-pihak-yang-membutuhkan-kebenaran/>. pada 15 Maret 2025 Jam 20.20.

Cyprianus Anto Saptowalyono, “Mengapa Kekerasan Polisi Terus Terjadi?” *Kompas*. diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/29/mengapa-kekerasan-polisi-terus-terjadi>. dikunjungi pada 21 Maret 2025. Jam 17.55.

Komnas HAM Republik Indonesia, 2025. “Peran Komnas HAM Membuka Ruang Kebebasan Sipil”. <https://www.komnasham.go.id/peran-komnas-ham-membuka-ruang-kebebasan-sipil>, dikunjungi pada tanggal 21 September 2025. Jam 09.13.

Tempo, 2024. “*Komnas HAM Jadi Amicius Curiae Kasus Ganti Akmal, Terduga Pelaku Eksploitasi Seksual Korban Extra Judicial Killing*”. <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-jadi-amicius-curiae-kasus-ganti-akmal-terduga-pelaku-eksploitasi-seksual-korban-extra-judicial-killing-55743>. dikunjungi pada tanggal 7 Maret 2025. Jam 13.20.

DOKUMEN

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

Laporan Komnas HAM 2022

Laporan Komnas HAM 2023

